### **TAJUK RENCANA**

### Berantas Pungli dengan Sapu Bersih

LANGKAH Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) patut diapresiasi. Meski sebagian kalangan menganggap Perpres tersebut berlebihan, kita menganggapnya tetap perlu dan penting. Perpres Saber Pungli sekaligus menunjukkan komitmen serius Presiden Jokowi untuk memberantas pungli di semua sektor.

Kita sangat memahami, tanpa Perpres pun, tindakan pungli melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi, baik yang diatur dalam KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundangan lainnya. Dengan kehadiran Perpres Satgas Saber Pungli tidak berarti terjadi tumpang tindih pengaturan, melainkan justru memperkuat atau penegas atas peraturan yang sudah ada.

Persoalannya bukan terletak pada payung hukum untuk memberantas pungli, melainkan pada sejauh mana aturan yang sudah ada dapat berlaku efektif. Melalui pembentukan Satgas tentu operasionalnya lebih terfokus, yakni memerangi pungli di semua sektor. Pun kita tak mempersoalkan Satgas Saber Pungli yang dikomandani Menkopolhukam Wiranto, dengan leading sector Polri.

Kini Polri sedang menyeleksi siapa saja anggotanya yang masuk dalam Satgas Saber Pungli. Kita menilai, efektivitas Satgas Saber Pungli menjadi pertaruhan bagi Jokowi, yakni menguji sejauh mana komitmen Presiden dalam memberantas pungli. Dengan kata lain, kredibilitas Presiden Jokowi tak hanya tercermin dari aspek formal pembentukan Satgas, melainkan juga pada sejauh mana

efektivitas kerja Satgas.

Sekadar mengingatkan, semasa pemerintahan Soeharto pernah digencarkan operasi pemberantasan pungli yang dikenal dengan istilah Opstib atau Operasi Tertib yang fokusnya memberantas pungli. Namun, operasi yang dikomandani Pangkopkamtib Sudomo saat itu, hanya efektif sesaat, bukan untuk jangka panjang. Opstib yang dibentuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib itu hanya memberi efek jera sesaat. Selanjutnya, sejarah mencatat, pungli makin merebak di mana-mana tanpa bisa dicegah.

Sudah semestinya Presiden Jokowi belajar dari kegagalan Opstib masa Orde Baru. Memang, untuk memberantas pungli tak cukup hanya dengan komitmen, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata dan terintegrasi di semua sektor. Perbaikan sistem pengawasan mutlak dilakukan. Semua jajaran inspektorat harus dioptimalkan kerjanya. Transparansi dalam setiap pelayanan publik harus dikedepankan. Sebab, pungli muncul di tengah situasi remang-remang dan birokrasi yang bertele-tele.

Lebih penting lagi, Satgas Saber Pungli harus diisi orang-orang yang bersih dan memiliki integritas dalam pemberantasan pungli. Ungkapan klasik bahwa untuk membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih, kiranya masih sangat relevan. Dalam konteks itulah kita mengingatkan Satgas Saber Pungli tidak boleh main-main dan pilihpilih kasus. Apalagi, Satgas diberi kewenangan cukup luas, termasuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Masyarakat masih menunggu kedigdayaan Satgas Saber Pungli.  $\Box$  - c

#### Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

#### Reuni Akbar FKH-P UGM

REUNI Akbar Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKH-P) UGM akan diselenggarakan Minggu, 6 November 2016 bertempat di Wisma Kagama UGM, pukul 10.00 WIB sampai selesai.

Acara silaturahmi dan kangenkangenan mengenang masa-masa kuliah di FKH-P UGM.

Untuk itu kepada seluruh alumni FKH-P UGM angkatan 1949-1974 dimohon kehadiran dan partisipasinya menyemarakkan acara tersebut. Informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Prof Ir Krishna Agung Santosa MSc PhD, HP: 0811256750, WA: 081329979979, drh P Sudarminto MS, HP: 08157930511, Ir Sri Untari, HP: 08175464551. □ - c

Ir Suliestiyah Wiryodiningrat MM Ketua Panitia, HP: 081578708939

#### SMKN 3 Juara Umum Porgukar

PEKAN Olahraga Guru dan Karyawan (Porgukar) merupakan ajang lomba olahraga khusus bagi guru dan karyawan. Setiap tahun kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun semangat sportivitas para guru dan karyawan.

Tahun 2016 ini, Porgukar diselenggarakan 22-23 Oktober 2016 bertempat di lapangan SMKN 2 dan SMKN 3 Yogya. Jenis olahraga yang dilombakan antara lain badminton, tenis meja, catur, voli dan Kasti dengan peserta guru dan karyawan dari tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kota Yogya.

Layaknya atlet pada umumnya, semangat dan kemampuan para guru dan karyawan yang mewakili sekolahnya dalam setiap ajang lomba tersebut memang luar biasa. Meskipun memiliki jadwal mengajar yang padat, ternyata para guru dan karyawan yang menjadi peserta Porgukar tersebut tetap bisa fokus, penuh semangat, kompak dan sportif dalam bertanding demi mengharumkan nama baik sekolah ma-

sing-masing.
Setelah melewati babak penyisihan, semi final dan final, akhirnya SMK Negeri 3 (STM 2) Yogya berhasil menyabet gelar juara Umum dan berhak mempertahankan Piala Bergilir dari Walikota Yogya. Selamat dan sukses untuk Tim Porgukar SMKN 3 Yogya. □-c

Syahrina Ramadina SPdT MPd Guru SMKN 3 Yogya.

#### Aksi Sosial Muda-Mudi Kuroboyo

**SUMPAH** Pemuda menjadi bagian sejarah Indonesia yang menyatukan semangat para pemuda untuk menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan.

Dari semangat tersebut Keluarga Muda-Mudi (KMK) Kuroboyo dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Ulang Tahun KMK akan menggelar aksi sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Minggu, 30 Oktober 2016, pukul 09.00-12.00 WIB di lapangan voli Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul.

Penyelenggara mengajak seluruh masyarakat sekitar, khususnya para pemuda untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah tersebut.

Bagi masyarakat yang ingin ikut donor darah bisa datang langsung ke lokasi atau mendaftar via SMS/WA ke 08562963284 dengan format ketik: dondar\_nama\_umur\_golongan darah. Bagi peserta juga berkesempatan mendapatkan bingkisan menarik dan beberapa doorprize.

Mari saatnya kita berbagi kebaikan dalam rangka mempersatukan semangat para pemuda dalam aksi sosial donor darah bertema

#DarahMudaTukSesama. Informasi kegiatan hubungi Tri

Setya 085727070373. □ - c

Solihin Ika Sima

Kuroboyo, Caturharjo,

Pandak, Bantul.

# Pilkada dan Jalan Pintas Parpol

ERILAKU nerabas alias jalan pintas merupakan salah satu budaya yang saat ini sedang menjangkiti banyak aktor politik di negeri ini. Perilaku tersebut semakin tampak jelas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk Pilkada 2017 tahapannya saat ini sudah memasuki fase penyerahan berkas perbaikan paslon. Dan saat ini ada sekitar 328 paslon dari 101 daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak.

Di antaranya 249 paslon diusung oleh parpol atau gabungan parpol dan 79 paslon lainnya berangkat dari jalur perseorangan. Sebagaimana ketentuan PKPU No 9 tahun 2015 pasal 5 ayat (2) bahwa paslon yang menempuh jalur dukungan parpol atau gabungan parpol minimal harus mengantongi 20% dari jumlah kursi DPRD setempat atau 25% dari suara sah Pemilu Legistlatif 2014.

#### Proses Rekruitmen

Dengan persentase tersebut seharusnya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan parpol bisa mencapai sekitar 350-400 paslon. Kalau tidak berarti ada 'PR' serius dalam proses rekruitmen, kaderisasi dan pelembagaan partai politik. Apalagi tidak sedikit paslon yang nerabas mengambil jalan pintas untuk memenangkan pilkada meskipun mereka tidak pernah dibesarkan dalam kader partai pengusungnya. Kandidat short cut semacam itu biasanya lahir dari kalangan artis ternama, pengusaha, public figure, pejabat atau mantan pejabat. Sebut saja Ahmad Dhani, Ahok, Agus Harimurti, Anis Baswedan dan yang lain.

Sementara partai politik sendiri tidak peduli dengan proses pelembagaan partai dan pembinaan kadernya. Mereka cenderung pragmatis dan oligarkis dalam menghadapi pilkada. Potret ini bisa dilihat bagaimana para kandidat terpilih tersebut mampu menyingkirkan kader-kader organik yang selama ini berjuang berdarah-darah di internal partainya masing-masing.

Fenomena kader instan ini semakin menjadi setelah partai-partai politik kehilangan *platform* politiknya setelah reformasi. Tidak sedikit partai

#### **Ahmad Anfasul Marom**

yang kehilangan ruh ideologinya sehingga tidak ada pembeda antara partai satu dengan yang lain. Akibatnya banyak aktor politik yang memanfaatkan situasi ini dengan mengambil jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan. Sementara partai politik sendiri cenderung pragmatis selagi calon yang diusungnya bisa menang.



Ada beberapa permasalahan yang dapat kita angkat di sini. *Pertama*, partai belum memiliki prosedur rekruitmen yang mapan baik dari sisi konsep maupun implementasinya. Sehingga banyak kader instan yang terjun di panggung politik tanpa memahami *platform* partainya. *Kedua*, partai masih mengandalkan model rekruitmen konvensional yakni mengandalkan basis dukungan lama. *Ketiga*, proses seleksi kandidat kepala daerah atau caleg seringkali mengesampingkan pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman dan penugasan yang dimiliki bakal calon (Lili Romly, 2008).

#### Lembaga Survei

Catatan tersebut mengonfirmasi lembaga-lembaga survei yang selalu menempatkan parpol di urutan paling akhir dibanding lembaga publik lainnya dalam mengukur tingkat kepuasan publik seperti institusi kepolisian, KPK, pengadilan dan lainnya. Dari tahun ke tahun selalu saja sama peringkatnya seolah-olah parpol enggan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Karenanya perlu upaya ekstra untuk mendorong pembaharuan partai politik di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi fokus reformasi parpol ini yaitu metode yang digunakan dan substansi yang dipasarkan. Dari segi metode partai harus mampu mendayagunakan sarana prasarana yang ada. Sedangkan dari sisi substansi partai harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespons berbagai isu yang terjadi.

Terakhir, perlu penulis tekankan bahwa bagaimanapun partai merupakan salah satu instrumen pokok yang absah dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Pilkada serentak 2017 yang akan berlangsung di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia bisa menjadi arena kontestasi yang produktif bagi partai politik dalam mengobati kekecewaaan publik. Dan apabila kekecewaan publik terhadap partai ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin proses konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini masih terus-menerus kita bangun akan 'mangkrak'. Bahkan terhenti kalau tidak tergusur mundur.  $\Box$  - c

\*) **Ahmad Anfasul Marom MA**, Dosen Ilmu Politik UIN Sunan Kalijaga, Komisioner KPU DIY.

#### Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

# Pungli dan Kita

EBRAKAN baru Presiden Joko Widodo. Saat menyerahkan sertifikat tanah di Solo beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menyatakan bertekad memberantas pungli (pungutan liar). Pungli sekecil apa pun akan saya berantas, tegas Mantan Walikota Solo itu.

Pungli memang meresahkan dan menjengkelkan. Namun, pungli telah menjadi budaya. Kita sudah terbiasa memberi tip kepada seseorang yang membantu. Misalnya di hotel, tanpa berpikir panjang kita memberikan pecahan rupiah kepada penggantar. Kita seakan terhipnotis oleh ruang publik yang sudah sedemikian membenarkan praktek pungli. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pungli bisa hilang dari 'budaya' bangsa? Bagaimana mengurai persoalan pelik ini?

#### Kemalasan Birokrasi

Membenarkan keburukan memang telah menjadi bagian dari tradisi bangsa. Karena keburukan dilakukan secara berulang dan simultan, maka ia kemudian menjadi sebuah 'kebenaran'. Sebaliknya, kebenaran yang jarang dilakukan, bahkan seringkali diolok-olok, maka ia akan menjadi sebuah 'keburukan'.

Demikian pula dengan pungli. Ia akan karena masyarakat membenarkan praktik ini. Mereka menganggap wajar jika seseorang yang telah membantunya mendapat imbalan. Bahkan, masyarakat menganggap imbalan itu tidak ada artinya jika ia harus kehilangan waktu untuk antre, menunggu proses, dan dokumen yang tak kunjung rampung karena sistem.

Maka jalan pintas untuk itu adalah memberikan sogokan kepada birokrat untuk memperlancar urusan. Uang pelicin ini bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang wajar dan biasa. Pembenaran keburukan inilah yang kemudian menjalar dalam ruang alam bawah sadar manusia. Manusia secara cepat dan tergerak dari pikiran memberikan uang pungli demi sebuah kelancaran dokumen. Mereka tidak lagi membaca aturan yang berlaku. Bagi mereka dokumen cepat selesai dan urusan beres lebih penting dan berharga daripada lembaran rupiah

#### Benni Setiawan

yang diberikan.

Oleh karena itu, pungli akan dapat hilang saat masyarakat melakukan lompatan besar. Artinya, alam pikir masyarakat perlu mendapat hentakan bahwa pungli adalah salah. Pungli hanya akan menyuburkan ruang 'kemalasan' birokrasi. Aparatur akan memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan uang tambahan. Aparatur pun menganggap itu adalah uang halal, karena masyarakat secara suka rela memberikan.

Hentakan itu kini sudah dipantik Presiden Jokowi. Presiden telah mendeklarasikan diri sebagai orang yang siap memerangi pungli. Pungli adalah sistem kerja instan yang telah merasuk dalam sumsum tulang dan darah masyarakat Indonesia. Sehingga sumsum tulang dan darah itu perlu dibersihkan dengan memasukkan banyak cairan yang membersihkan.

Salah satu 'cairan' yang dapat digunakan sebagai alat bersih-bersih adalah mendekonstruksi kemapanan. Masyarakat perlu sadar bahwa pungli adalah cikal bakar korupsi. Pungli menjadikan birokrasi tidak berdaya.

Mereka hanya bekerja berdasarkan berapa banyak uang pungutan yang didapat.

Selain itu, masyarakat Indonesia perlu berani menyuarakan bahwa biaya tambahan atas nama apa pun merupakan kotor dan buruk. Masyarakat perlu menggerakkan kesadaran kolektif agar rencana besar ini berhasil.

#### ana besar ini berhasil. **Kesadaran Kolektif**

Kesadaran Kolektif
Menurut Durkheim, kontak
dan interaksi orang menghasilkan situasi, di mana pikiran
para peserta tembus-menembus
dan rembes-merembes. Terjadi
suatu konpenetrasi kesadarankesadaran individual. Hasilnya
adalah kesadaran kolektif yang

melebihi jumlah total kesadaran individual. Karena pikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat berbeda dan berlainan dari pikiran, perasaan, dan perilaku individu-individu. Fakta sosial harus diterangkan dengan fakta sosial lain, bukan dengan fakta psikologis atau hukum alam (KJ Veeger, 1985).

Pungli yang telah membudaya merupakan fakta sosial yang perlu dilawan dengan fakta sosial baru bahwa ia menjadikan bangsa ini tidak berdaya. Pungli menjadikan birokrasi malas dan mengajarkan masyarakat budaya instan dan pragmatis.

Pada akhirnya, memberantas pungli perlu dipahami dalam 'pertarungan' ide. Pasalnya, pungli telah lama ada di Nusantara dan telah dianggap biasa dan wajar. Dekonstruksi pemikiran dan menjejer fakta sosial terkait kelumpuhan bangsa akibat pungli perlu menjadi agenda pemerintah. Pemantik itu telah disulut oleh Presiden Jokowi. Tinggal kita berani dan siap berubah atau tidak. □ - c

\*)**Benni Setiawan**, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute.

# Pojok KR

Perhatikan tanah wakaf di lokasi terdampak bandara.
-- Hindari budaya menang sendiri.

Pemerintah siapkan 3 peraturan turunan UU Kebiri.
- IDI tak boleh menolak perintah UU.
\*\*\*

Tower seluler ilegal mulai ditindak.
-- Lebih baik terlambat daripada tidak.

Berabe

## Xdaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi.

Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos

Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Litbang Diklat Redaksi: Wismoko Poernomo, Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, Fotografer: Effy Widjono Putro, Franz Boedi Sukarnanto, Surya Adi Lesmana, Bambang Nurcahya. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani S.E. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) @ Iklan Wanggan, Full Colour Rp 51.000 00/ mm klm (min. 600 mm klm) Iklan Kuning (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm maks. 2 klm x 150 mm)

baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta. 55232. Fax (0274) - 563125. Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP, Wakil Kepala Biro: Sukaryono BA.
Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Dra Guno Indarjo, Kepala Biro: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.
Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan.

Kulonnega: Jalan Veteran No. 16, Wates (2007) 174738. Kongal Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Amerikan Mangalang, Suprapto SPd, Kepala Biro: Mangalang, Suprapto SPd,

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suyatno, Kepala Biro: R Agussutata.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Subardi, Kepala Biro: Y Agus Waluyo.

 $\hbox{-} Wartawan\ KR\ tidak\ menerima\ imbalan\ terkait\ dengan\ pemberitaan\ \hbox{-}\ Wartawan\ KR\ dilengkapi\ kartu\ pers/surat\ tugas.}$